

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Aisyah Dara, 2003, *Hubungan Birokrasi dan Demokrasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Effendy Muhadjir, 1995, *Birokrasi Pemerintahan Menyongsong Era Pasar Bebas: dari Bossy Attitude ke Servicer Minded (sebuah review)*, dalam Jurnal Bestari, Januari-April, Yogyakarta.
- Hadjon M. Philipus, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hoessein, 2001, *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Tata Negara, Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Huntington. P. Samuel, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerjemah Murniatun, PT. Intermedia Press, Jakarta.
- Kranenburg, 1955, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta.
- Moh. Kusumohamidjojo dkk, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar Offset Press, Yogyakarta.
- Nasution Mirza, 2004, *Negara dan Konstitusi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun S.F., dkk, 2002, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

-----, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Tahir Ashary M, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Theo Hujiber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Situmorang Tony, 2004, *Pandangan Rousseau Tentang Negara Sebagai Kehendak Umum*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-115/PB/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-190/PB/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

C. Lain-lain

Tesis Johny Harry Isabela Patty, 2012, *Fungsi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan*, Magister Hukum UGM

Tesis Mudagdo, 2012, *Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DIY Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Konteks Pelayanan Masyarakat*, Magister Hukum UGM

Tesis Sheila Kusuma Wardani Amnesti, 2014, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Pendidikan Oleh Pemerintah Kota Surakarta*, Magister Hukum UGM

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2013.

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2014.

Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Tahun 2015.